

PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROVINSI RIAU

Caska*

**Peneliti Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pendidikan Ekonomi-FKIP Unri*

RM. Riadi**

***Staff Pengajar Pendidikan Ekonomi P-IPS, FKIP Universitas Riau
e-mail : rm_riadi@yahoo.co.id
Contact person: +6281371599967 / +62761-7008993*

Abstrack

This research aimed to know disparity of economic growing in Riau Province between Regency. The data was analyzed with Kuadran System, Williamson Indeks, entropi Theil Indeks and the proof of Kuznets Hypothesis. From the research, can conclusion that only Pekanbaru City in First Kuadran ((high growth and high income). The area that categorize into high growth but low income is Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu and Siak Regency.. Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar can categorized into high income but low growth, meanwhile the area categorized into low income and low growth are Rokan Hilir, Dumai and Bengkalis. In Williamson and entropi Theil Index got different answer. According to Williamson Index, Riau Province have increasing disparity in growing of economic but entropi Theil Index categorized that Riau Province have decreasing disparity of growing in economic. Based on Williamson and entropi Theil Index, Riau Province is not categorized based on Kuznets Hypothesis.

Keywords : Income and Growth, disparity, economic, Riau Province

Pendahuluan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh masing-masing orang, daerah satu dengan lainnya maupun negara satu dengan negara lainnya. Peting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestik Produk* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada PDRB suatu provinsi, kabupaten dan kota.

Namun muncul kemudian alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini lebih menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999 ; Blakely E. J, 1989). Tolok ukur

keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Lincoln Arsyad, 1999).

Selain itu masalah ketimpangan ekonomi antardaerah tidak hanya tampak pada wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi melainkan juga pada antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan antardaerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai.

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecendrungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (M.P.Todaro, 2000).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan tradisional. Beberapa ekonomi modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Mudrajat Kuncoro, 2003).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antardaerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Mudrajat Kuncoro, 2004)

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi/daerah yang cukup kaya baik dengan hasil bumi berupa migas dan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet dan lainnya. Akan tetapi masyarakat masih belum puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masing-masing daerah. Hal ini tentu saja akan dapat menimbulkan gejolak bagi daerah yang tidak puas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah atau kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Riau serta untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Riau.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada daerah Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Data yang diperlukan antara lain data berupa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), data berupa sensus sosial ekonomi masing-masing Kabupaten dan Provinsi Riau, pendapatan per kapita dari masing-masing kabupaten dan Provinsi Riau. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ;

1. Analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah adalah Analisis Tipologi Klassen/Daerah (H. Aswandi dan Mudrajat Kuncoro, 2002). Kriteria yang digunakan terdiri dari empat ;

- a) Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau
 - b) Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau
 - c) Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau
 - d) Dan kuadran IV (keempat) adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau
2. Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Daerah digunakan 2 jenis analisis yakni ;
- a) Indeks Ketimpangan Williamson (Syafrizal, 1997) yakni analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) dengan rumusan sebagai berikut ;

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Dimana ;

Y_i = PDRB per kapita di Kabupaten i

Y = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Riau

f_i = jumlah penduduk di Kabupaten i

n = jumlah penduduk di Provinsi Riau

Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan yang makin melebar.

- b) Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun rumusan dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut (L.G. Ying, 2000) ;

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) / X_j / X]$$

Dimana ;

$I(y)$ = indeks entropi Theil

Y_j = PDRB per kapita kabupaten j

Y = rata-rata PDRB perkapita Provinsi Riau

X_j = jumlah penduduk kabupaten j

X = jumlah penduduk Provinsi Riau

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan.

3. Kurva U Terbalik oleh Kuznets (M.P.Todaro, 2000) yaitu dimana pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk kurva U-terbalik. Dalam hal ini pembuktian kurva U-Terbalik digunakan sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004) ;
 - Menghubungkan antara angka indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau.
 - Menghubungkan antara angka indeks Entropi Theil dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau.

Dengan indikator apabila kedua angka indeks tersebut menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets berlaku di Provinsi Riau sebaliknya apabila kedua angka indeks tidak menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets tidak berlaku di Provinsi Riau.

Hasil Dan Pembahasan

Pola dan Struktur Ekonomi Provinsi Riau

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita. Dengan menentukan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah per kabupaten dibagi menjadi empat golongan yaitu kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), kabupaten maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten yang berkembang cepat (*high growth but low income*) dan kabupaten yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). (Sjafrizal, 1997; Mudrajat Kuncoro dan Aswandi, 2002).

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa di Provinsi Riau selama periode tahun 2003-2005 dapat disimpulkan bahwa jika indeks Williamson lebih besar atau lebih kecil berarti Indeks entropi Theil lebih besar atau kecil juga. Dalam arti jika PDRB per kapita antar kecamatan lebih rendah atau merata belum tentu tingkat ketimpangan pembangunannya lebih kecil maupun sebaliknya.

Tabel 1. PDRB Per Kapita Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten	PDRB Per Kapita			Rata-Rata
		2003	2004	2005	
1	Kuantan Singingi	7.37	8.02	8.66	8.02
2	Indragiri Hulu	8.69	9.26	9.97	9.31
3	Indragiri Hilir	6.43	6.92	7.38	6.91
4	Pelalawan	9.17	9.35	9.69	9.40
5	Siak	8.40	8.77	9.15	8.77
6	Kampar	5.33	5.69	6.04	5.69
7	Rokan Hulu	4.84	5.18	5.52	5.18
8	Bengkalis	4.56	4.74	4.99	4.76
9	Rokan Hilir	5.80	6.15	6.57	6.17
10	Pekanbaru	6.79	7.18	7.36	7.11
11	Dumai	5.65	5.89	6.05	5.86
	Rata-Rata Riau	6.40	6.83	7.26	6.83

Sumber : Data Olahan BPS, 2003-2005

Selama tahun 2003-2005, rata-rata PDRB Per kapita Provinsi Riau sebesar 6,83. Daerah yang tertinggi diatas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 8,02, Kabupaten Indragiri Hulu , Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru masing-masing sebesar 9,31, 9,40 8,77 dan 7,11. Untuk PDRB atas harga konstan non migas tahun 2000, selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2003, 2004 dan 2005 rata-rata tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yakni sebesar 5.137.941,59 dan 5.008.005,49. Sedangkan yang terendah dimiliki oleh Kota Dumai dan Kabupaten Kuantan Singingi yakni masing-masing sebesar 1.270.909,30 dan 1.944.157,66.

Dari gambar 1, dapat diketahui bahwa daerah yang mengalami cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) hanya 1 (satu) daerah saja yakni Kota Pekanbaru. Daerah atau kabupaten yang dikategorikan berkembang cepat dalam arti pertumbuhan (*high growth but low income*) adalah Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak. Untuk daerah atau kabupaten yang maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, sedangkan daerah yang pembangunan atau pertumbuhannya relatif tertinggal adalah Kabupaten Rokan Hilir, Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Ketimpangan Ekonomi antar Daerah

Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih baik, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Tabel 2. PDRB Atas Harga Konstan Non Migas

No	Nama Kabupaten	PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000			Rata-Rata
		2003	2004	2005	
1	Kuantan Singingi	1,776,319.21	1,947,432.73	2,108,721.03	1,944,157.66
2	Indragiri Hulu	2,459,709.30	2,639,431.65	2,857,461.63	2,652,200.86
3	Indragiri Hilir	4,035,890.53	4,348,272.91	4,654,045.18	4,346,069.54
4	Pelalawan	1,913,725.80	2,050,712.95	2,195,348.21	2,053,262.32
5	Siak	2,313,289.91	2,478,750.37	2,653,067.99	2,481,702.76
6	Kampar	4,299,917.91	5,074,253.30	6,039,653.57	5,137,941.59
7	Rokan Hulu	3,473,668.48	4,231,715.29	5,143,410.90	4,282,931.56
8	Bengkalis	2,889,500.03	3,126,467.10	3,357,161.38	3,124,376.17
9	Rokan Hilir	2,449,829.07	2,625,992.95	2,829,730.20	2,635,184.07
10	Pekanbaru	4,568,757.09	5,004,326.22	5,450,933.15	5,008,005.49
11	Dumai	1,170,056.51	1,271,450.43	1,371,220.97	1,270,909.30
Rata-Rata Provinsi		2,850,060.35	3,163,527.81	3,514,614.02	3,176,067.39

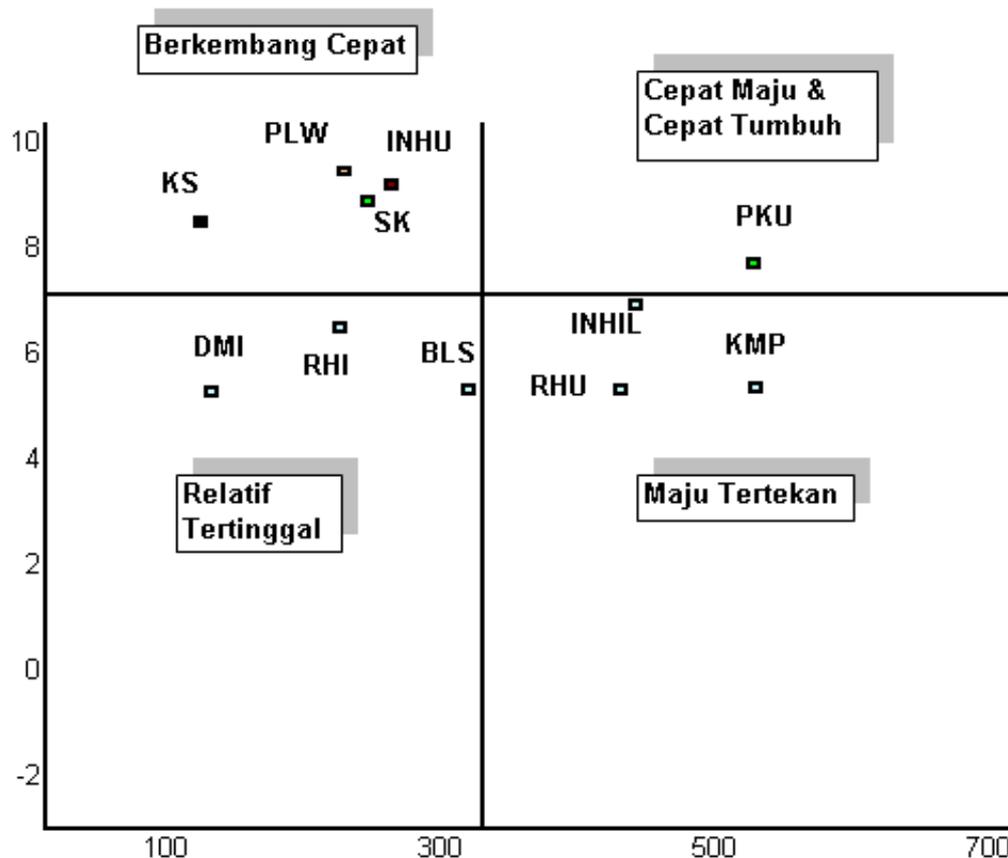
Sumber : Data Olahan BPS, 2003-2005

Ketimpangan pembangunan antar daerah atau antar kabupaten di Provinsi Riau selama tahun 2003-2005 dapat dianalisis dengan menggunakan indek ketimpangan regional (*regional inequality*) atau biasa disebut dengan nama Indeks Williamson (Sjafrizal, 1997). Dalam hal ini Indeks Williamson dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan PDRB per kapita antara kabupaten di Provinsi Riau selama periode 2003-2005 rata-rata sebesar 0,028. Selama tahun 2003-2005, terjadi kenaikan ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten walaupun tidak signifikan seperti tahun 2003 Indeks Williamson sebesar 0,027 naik menjadi sebesar 0,028 tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 0,030. Hal ini berarti membuktikan bahwa semakin banyak pembangunan yang harus dilakukan maka tingkat kemungkinan ketimpangan yang akan terjadi semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 mengenai kenaikan Indeks Williamson.

Tinggi rendahnya nilai Indeks Williamson mengandung arti bahwa ketimpangan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar daerah atau antar kabupaten di Provinsi Riau dibandingkan dengan kabupaten yang ada tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat PDRB per kapita antar kabupaten di Provinsi Riau tidak merata. Untuk kabupaten yang Indeks Williamsonnya berada dibawah rata-rata indeks provinsi atau lebih rendah antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Kuantan Singingi mengandung arti bahwa secara rata-rata tingkat PDRB per kapita antar kabupaten yang ada relatif lebih merata jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Riau.

**Gambar 1. Pola dan Struktur Perekonomian Provinsi Riau, 2003-2005
(Dalam Puluhan Ribu)**



Keterangan :

- PLW : Kabupaten Pelalawan
- KS : Kabupaten Kuantan Singingi
- INHU : Kabupaten Indragiri Hulu
- INHIL : Kabupaten Indragiri Hilir
- DMI : Kota Dumai
- BLS : Kabupaten Bengkalis
- RHU : Kabupaten Rokan Hulu
- RHI : Kabupaten Rokan Hilir
- PKU : Kota Pekanbaru
- KMP : Kabupaten Kampar

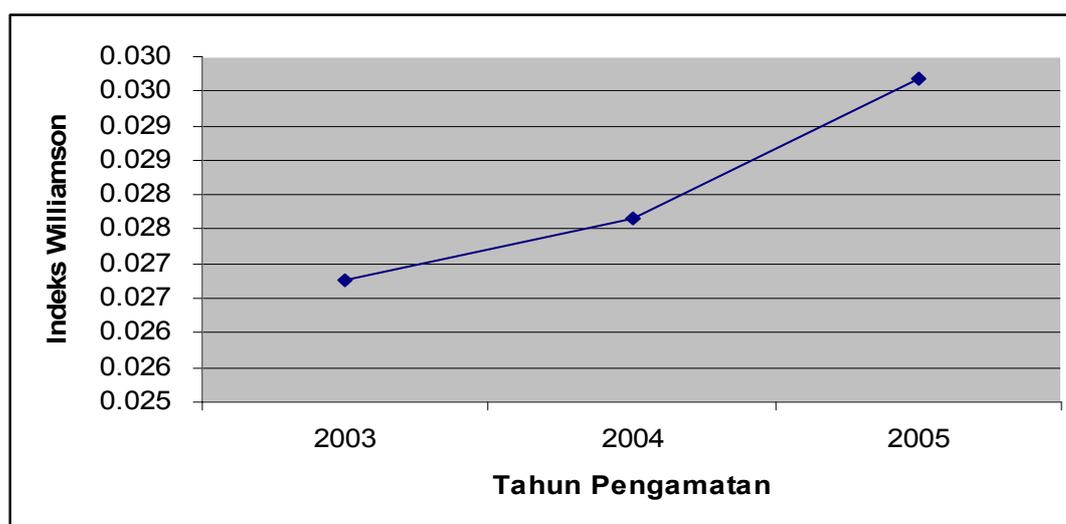
Sumber : Data Olahan

Rendahnya nilai Indeks Williamson antar daerah atau kabupaten bukan berarti secara otomatis menerangkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut (Indeks Williamson lebih rendah) lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. (Indeks Williamson lebih tinggi dari rata-rata provinsi). Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kabupaten di Provinsi Riau tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita antar kabupaten di Provinsi Riau yang didistribusikan tersebut dengan rata-rata PDRB daerah atau kabupaten lainnya.

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi Riau Periode 2003-2005

No	Kabupaten	IW 2003	IW 2004	IW 2005	RERATA IW
1	Kuantan Singingi	0,008	0,011	0,014	0,011
2	Indragiri Hulu	0,052	0,055	0,064	0,057
3	Indragiri Hilir	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Pelalawan	0,057	0,045	0,042	0,048
5	Siak	0,039	0,034	0,031	0,035
6	Kampar	0,021	0,022	0,024	0,023
7	Rokan Hulu	0,028	0,029	0,030	0,029
8	Bengkalis	0,076	0,093	0,106	0,091
9	Rokan Hilir	0,005	0,006	0,006	0,006
10	Pekanbaru	0,004	0,003	0,000	0,002
11	Dumai	0,004	0,006	0,010	0,007
	RERATA	0,027	0,028	0,030	0,028

Sumber : Data Olahan

Gambar 2. Grafik Indeks Willamson, 2003-2005

Sumber : Data Olahan

Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan suatu daerah selain memakai Indeks Williamson juga dapat memakai Indeks entropi Theil. Indeks entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Dari hasil penelitian didapatkan nilai indeks entropi periode tahun 2003-2005, rata-rata sebesar 1,158. Hal ini berbeda dengan Indeks Williamson, maka pada indeks entropi periode tahun 2003-2005 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dimana pada tahun 2003, nilai indeks entropi sebesar 1,174 sedangkan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 1,142. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 mengenai penurunan Indeks entropi Theil.

Tabel 4. Indeks entropi Theil Provinsi Riau Periode 2003-2005

No	Kabupaten	I(y) 2003	I(y) 2004	I(y) 2005	RERATA I(y)
1	Kuantan Singingi	1,526	1,572	1,612	1,570
2	Indragiri Hulu	1,801	1,804	1,838	1,815
3	Indragiri Hilir	0,854	0,871	0,880	0,868
4	Pelalawan	2,125	1,993	1,884	2,001
5	Siak	1,741	1,688	1,644	1,691
6	Kampar	0,702	0,706	0,713	0,707
7	Rokan Hulu	0,762	0,771	0,779	0,770
8	Bengkalis	0,496	0,473	0,457	0,475
9	Rokan Hilir	0,886	0,881	0,894	0,887
10	Pekanbaru	0,898	0,875	0,832	0,868
11	Dumai	1,127	1,085	1,030	1,081
	RERATA	1,174	1,156	1,142	1,158

Sumber : Data Olahan

Indeks entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil, maka ketimpangannya akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. Hal ini menunjukkan berarti setiap pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Riau selama periode tahun 2003-2003 menurut Indeks entropi Theil maka tingkat ketimpangan semakin rendah.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa di Provinsi Riau selama periode tahun 2003-2005 dapat disimpulkan bahwa jika indeks Williamson lebih besar atau lebih kecil berarti Indeks entropi Theil lebih besar atau kecil juga. Dalam arti jika PDRB per kapita antar kecamatan lebih rendah atau merata belum tentu tingkat ketimpangan pembangunannya lebih kecil maupun sebaliknya.

Pembuktian Hipotesis Kuznets

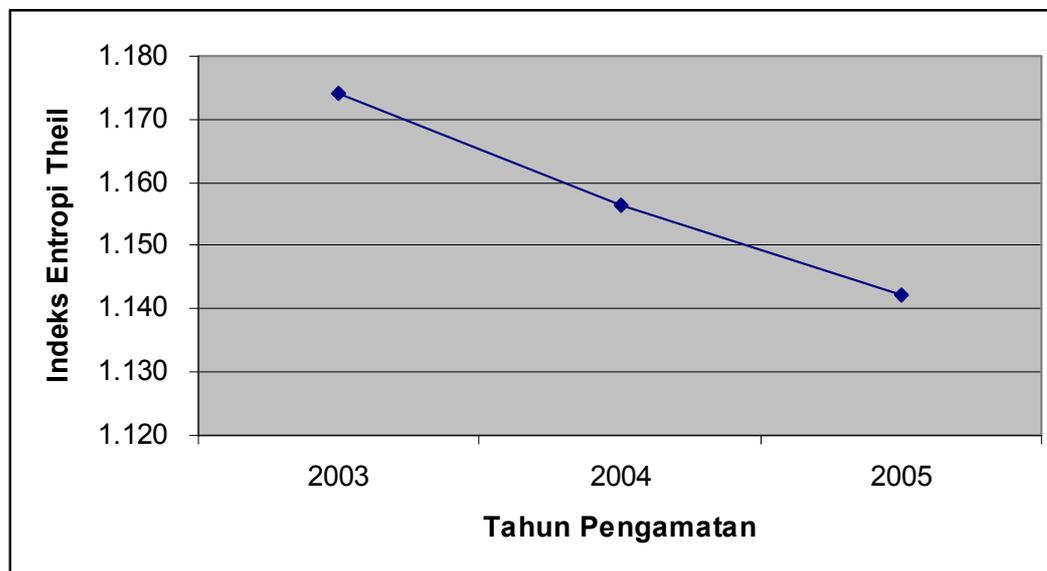
Dari gambar 2 dan 3 dapat diketahui Indeks Williamson maupun Indeks entropi Theil yang menunjukkan kecenderungan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dalam periode tahun 2003-2005. Akan tetapi kecenderungan tersebut belum tentu dapat membuktikan hipotesis Kuznets di Provinsi Riau berlaku.

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan cara membuat grafik antara PDRB dengan angka indeks ketimpangan baik Indeks Williamson maupun Indeks entropi Theil. Grafik tersebut menggambarkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson maupun pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan entropi Theil pada periode 2003-2005.

Dari gambar 4 dan 5 dapat diketahui bahwa kurva U terbalik tidak sempurna. Sehingga bisa dikatakan bahwa di Provinsi Riau pada masa-masa awal pertumbuhan ketimpangan memburuk dan masa berikutnya ketimpangan menurun, namun pada periode 2003-2005 terjadi ketimpangan

yang terjadi tidak memburuk pada periode berikutnya. Gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan tidak berlaku di Provinsi Riau.

Gambar 3. Grafik Indeks entropi Theil, 2003-2005



Sumber : Data Olahan

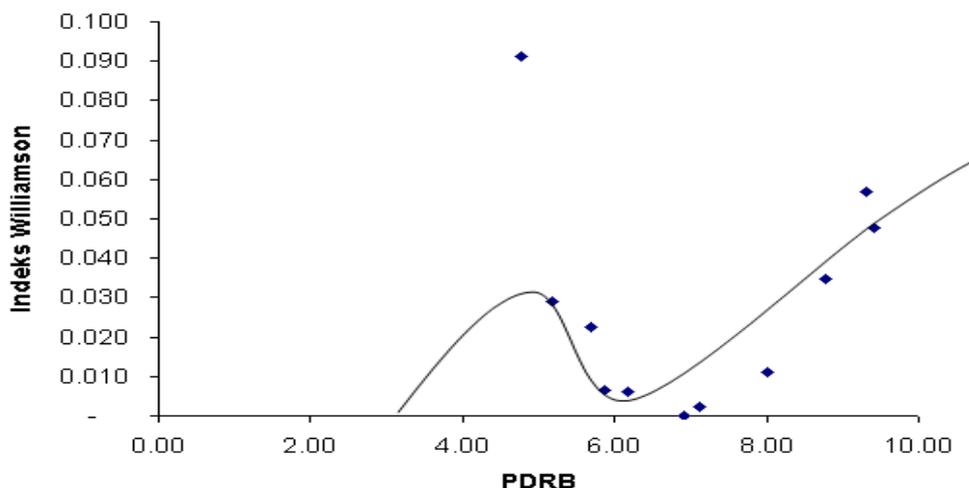
Selain menggunakan gambaran kurva, peneliti juga menggunakan gambaran secara statistik yakni melalui pengolahan data statistik melalui korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara PDRB dengan Indeks Williamson dan antara PDRB dengan Indeks Entropi Theil. Dari hasil analisis korelasi Pearson antara PDRB dengan Indeks Williamson terdapat nilai $-0,997$ dengan tingkat signifikansi $0,23$ dan korelasi antara PDRB dengan Indeks entropi Theil dengan nilai $0,982$ dan signifikansi $0,61$ yang berarti secara statistik korelasi ini kurang kuat karena tidak terbukti secara signifikansi pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 5. Korelasi Pearson antara PDRB dengan Indeks Williamson dan Indeks entropi Theil

Korelasi	Signifikasi	PDRB
Indeks Williamson	0,23	-0,997
Indeks entropi Theil	0,61	0,982

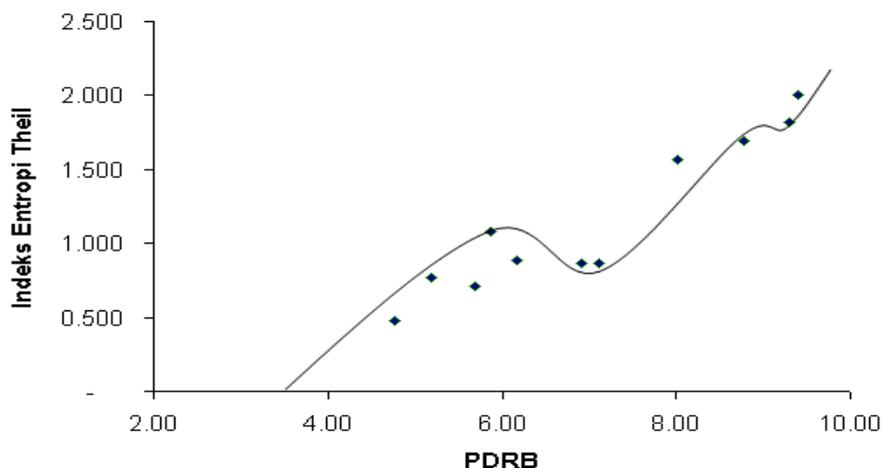
Sumber : Data Olahan

Gambar 4. Kurva Hubungan antara Indeks Williamson dengan PDRB Provinsi Riau Periode 2003-2005



Sumber : Data Olahan

Gambar 5. Kurva Hubungan antara Indeks entropi Theil dengan PDRB Provinsi Riau Periode 2003-2005



Sumber : Data Olahan

Kesimpulan

1. Di dalam pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau, daerah yang termasuk daerah yang mengalami cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) hanya 1 (satu) daerah saja yakni Kota Pekanbaru. Daerah atau kabupaten yang dikategorikan berkembang cepat dalam arti pertumbuhan (*high growth but low income*) adalah Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak. Untuk daerah atau kabupaten yang

maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, sedangkan daerah yang pembangunan atau pertumbuhan ekonominya relatif tertinggal adalah Kabupaten Rokan Hilir, Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

2. Selama periode pengamatan 2003-2005, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Provinsi Riau yang mengatakan adanya kurva U terbalik.

Rekomendasi

1. Perlunya perhatian pemerintah secara serius untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi terutama untuk pemerataan pembangunan dan PDRB per kapita penduduk di kabupaten atau daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat atau sentra ekonomi di daerah melalui pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir.

Daftar Kepustakaan

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Blakely, E. J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. California: SAGE Publication, Inc
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2002, 27 - 45
- _____. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma, LP3S
- Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma LP3ES*, No 3 Tahun XXVI.
- Sukirno, Sadono. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI

Todaro, M.P. 2000. *Economic Development*, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.

Ying, L.G. 2000. China's Changing Regional Disparities during the Reform Period. *Journal Economic Geography*, XXIV (7).